

# Kampanye Khilafah di Tengah Naiknya Isu LGBT

written by Dr. (c) Khalilullah, S.Ag., M.Ag.



**Harakatuna.com.** Sekarang saya bahas Indonesia dan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). Saya mulai dari Indonesia. Indonesia termasuk salah satu negara bangsa (bukan negara Islam) yang menganut asas Demokrasi atau kebebasan berpendapat dan berbuat. Kebebasan ini bukan lantas tidak terbatas. Ia masih dibatasi dengan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945.

Indonesia dengan Demokrasi disebut-sebut sebagai negara plural atau negara yang merangkul semua perbedaan, baik mulai perbedaan ideologi sampai perbedaan keyakinannya. Lihat saja, Indonesia menerima enam macam agama, semisal Kristen, Islam, dan seterusnya. Bahkan, ideologi pun tetap diterima dengan pikiran yang terbuka (*open minded*) semisal ideologi Sunni dan Syiah.

Dari situlah, penting menghadirkan nilai-nilai moderasi atau berada di tengah-tengah. Maksudnya, tidak ekstrem atau tertutup dalam berpikir dan keras dalam berbuat. Orang yang menegakkan nilai-nilai moderasi tidak gampang menghakimi orang lain karena saling berbeda.

Kemudian, bagaimana dengan perbedaan seksual (LGBT)? Masihkah asas

Demokrasi memberikan ruang di Indonesia? Terkait LGBT Indonesia belum merumuskan aturan yang tegas terhadap kaum LGBT, meski sangat mungkin kasus ini dihubung-hubungkan dengan aturan yang lain.

Aturan yang tegas, maksud saya, adalah sikap negara terhadap kasus LGBT, apakah fenomena ini dapat dibenarkan atau dilarang. Justru, ketegasan aturan dapat dilihat dalam Kitab Suci Al-Qur'an yang menggambarkan perbuatan kaum Luth yang melakukan LGBT.

Tidak heran jika umat Islam merah ketika kedatangan pasangan LGBT asal Indonesia-Jerman di Indonesia, lebih tepatnya di Podcast Deddy Corbuzier. Akibatnya, satu konten di channel YouTube Deddy terpaksa dihapus (*take down*).

Tak hanya Deddy, Menkopolhukam Mahfud MD dipertanyakan ketegasannya dalam menyikapi LGBT. Dulu sebelum jadi Menko, Mahfud menolak keras LGBT. Sayangnya, sekarang ia tidak memberikan celah dengan berdasarkan asas Demokrasi.

Tindakan Mahfud sebenarnya ambigu. Maka dari itu, ia perlu merumuskan aturan tegas dari pemerintah terkait hubungan seks kontroversial ini. Dengan tidak aturannya yang tegas, LGBT tidak punya payung hukum yang jelas di Indonesia.

Sisi negatif yang lain, isu LGBT akan dijadikan lahan yang empuk bagi pengusung Khilafah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Mereka akan berdalih Demokrasi belum berhasil mengatasi persoalan di suatu negara.

Negara hendaknya memperhatikan juga penyebaran ideologi Khilafah di tengah naiknya isu LGBT. Negara harus tegas mencegah pengusung Khilafah ikut berkomentar dalam persoalan LGBT. Karena, komentar mereka bukan untuk masa depan negara, tetapi untuk diri sendiri.[] *Shallallah ala Muhammad.*